

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 maret 2020. Coronavirus Disease Covid-19 pertama kali ditemukan di Provinsi Hubei China Desember 2019 dan wabah virus ini telah merebak ke 222 negara di dunia termasuk Indonesia. Jumlah kasus secara global pada Februari. 2021 adalah 108.153.741 kasus dan jumlah yang meninggal sebanyak 2.381.295 kasus. Sejak kemunculan pertamanya berbagai upaya dilakukan oleh WHO maupun negara-negara yang terjangkit demi memutus penyebaran pandemi ini (*World Health Organization*, 2021).

Anjuran Organisasi Kesehatan Dunia tersebut menjadi penting untuk dijadikan rujukan dalam penanggulangan wabah Covid-19 oleh negara-negara yang terjangkit termasuk di Indonesia. Penetapan aturan seperti *Lock Down* atau istilah *Social Distancing/Physical Distancing* merebak di berbagai *platform* media sosial, televisi, media cetak, maupun sosialisasi secara langsung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan sesuai dengan himbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan strategi yang

dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi dan telah diterapkan di beberapa daerah/kota. Pemberlakuan PSBB tersebut mengubah seluruh aktivitas atau kegiatan masyarakat khususnya pekerjaan publik harus dilakukan di rumah secara virtual.

Penerapan PSBB diharapkan tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat dalam penanggulangan wabah tapi juga ada upaya dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan cara menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada masyarakat. Masyarakat kelas menengah ke bawah banyak yang kehilangan mata pencaharian karena jumlah pekerja yang di PHK meningkat setelah upaya PSBB diterapkan. Pekerja sektor informal seperti buruh harian, nelayan, petani, pedagang kaki lima dan pekerja kasar lainnya yang paling rentan terkena dampak pandemi Covid-19.

Sektor informal yaitu pedagang kaki lima merupakan salah satu kelompok marginal yang paling merasakan krisis pandemi Covid-19 dan terkena dampak secara tidak proporsional. Pedagang yang bekerja pada sektor informal membutuhkan penghasilan demi untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga (ILO, 2020). Pedagang tidak dapat bergantung pada kompensasi penggantian pendapatan maupun tabungan karena sangat bergantung pada pendapatan pedagang sehari-hari, dan mempertaruhkan resiko terhadap virus Covid-19 demi mendapatkan pendapatan demi menafkahi keluarga. (ILO, 2020)

Banyak bidang informal yang berpotensi untuk diangkat dan digali menjadi salah satu bidang usaha yang menghasilkan keuntungan dan *income* keluarga sekaligus dapat menyerap tenaga kerja. Usaha berdagang merupakan salah satu alternatif lapangan kerja informal, yang ternyata banyak menyerap tenaga kerja, seperti pedagang informal di Kota Baru Kota Jambi, Pendapatan pedagang informal dapat menjadi tumpuan pendapatan keluarga. Pada umumnya para pedagang mempunyai tujuan utama mendapatkan laba tertentu (mungkin maksimal) dan mempertahankan atau semakin berusaha meningkatkannya. Untuk itu usaha sektor informal dalam perkembangannya yang semakin luas dan nyata perlu dibina dan dilindungi agar tumbuh menjadi unsur kekuatan ekonomi.

Dalam usaha perkembangan usaha sektor informal sangat diperlukan peranan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus selalu berupaya untuk mendorong dan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar usaha kecil tersebut dapat terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan demikian, usaha kecil akan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan mandiri serta dapat memperkuat struktur perekonomian nasional sehingga usaha kecil benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian nasional. (Prawirokusumo, 2001).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2019). Per 2019, jumlah pekerja formal di Indonesia sebanyak 55.272.968 pekerja atau meningkat 4,1 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 53.094.391 pekerja. Sementara di sektor informal, jumlah pekerja di tahun yang sama sejumlah 74.093.224 orang atau meningkat 0,16 persen dari tahun sebelumnya. Tren delapan tahun terakhir,

pertumbuhan sektor formal cenderung lebih tinggi ketimbang pekerja sektor informal. Meski demikian, pekerja Indonesia masih didominasi pekerja informal, 57,27 persen dibanding pekerja informal 42,73 persen pada 2019, sedangkan di Provinsi Jambi sebanyak 955.702 ribu orang atau sebanyak 56,49 persen penduduk bekerja di kegiatan sektor informal, dan secara persentase mengalami kenaikan sebesar 0,62 poin dibanding Agustus 2018 sebesar 55,87 persen.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang dan tiga “kaki” gerobak. Pedagang kaki lima yang terdapat di Kota Jambi sering kita jumpai dan tidak sulit untuk mencari keberadaannya. Namun sering berbuntut dengan penggusuran lokasi dagang karena mengganggu arus lalu lintas yang menyebabkan macet, terkesan kumuh dan semrawut. Pedagang biasanya memanfaatkan trotoar bahkan di badan jalan jembatan untuk berjualan. Aktivitas Pedagang kaki lima terjadi bukan hanya pada siang hari saja melainkan sampai malam hari. Terlihat semakin beragamnya barang yang di jajakan Pedagang Kaki Lima sekitar Tugu Keris Siginjai menandakan bahwa PKL-PKL tumbuh atau bertambah.

Sebagai pemasukan PAD dengan membayar retribusi Pedagang ini juga membuat dilematis pemerintah karena keberadaannya yang terkadang menuai

masalah. Keadaan itu dilakukan untuk bertahan hidup di Kota Jambi. Keterpaksaan membuat pedagang tetap melakukan hal tersebut meskipun seringkali harus menghadapi aparat pemerintah untuk penertiban. Untuk melakukan penertiban aparat Pemerintah Kecamatan Kota Baru bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi. Penertiban tersebut dilakukan karena perintah Walikota Jambi. Pedagang kaki lima yang beragam menjajakan dagangannya terutama di atas trotoar jalan sekitar Tugu Keris Siginjai masih perlu dan harus diperhatikan oleh pemerintah setempat agar tidak menimbulkan masalah PKL yang pada umumnya.

Berikut ini adalah jumlah persentase penduduk di Kota Jambi berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 (BPS). Pada tahun 2014, sektor informal di Kota Jambi mendominasi pekerja menurut status pekerjaan dengan persentase sebesar 36,99%. Dan sisanya bekerja di sektor formal sebesar 5,33%. dan untuk tahun 2015, sektor informal di Kota Jambi juga masih mendominasi sebesar 35,60%. Dan sisanya bekerja di sektor formal sebesar 7,85%. Sementara di tahun 2016, sektor informal di Kota Jambi menurun drastis pekerja menurut status pekerjaan dengan persentase sebesar 16,99%. Dan sisanya bekerja di sektor formal sebesar 4,31%.

Berbagai lapangan pekerjaan dalam sektor informal hadir di tempat pariwisata Tugu Keris Siginjai dengan menawarkan berbagai macam profesi pedagang, pedagang kaki lima, maupun pedagang di warung. Pedagang kaki lima umumnya bisa ditemui hampir di setiap jalan di sepanjang jalan sekitar Tugu

Keris Siginjai, dan usaha yang di perdagangkan seperti pedagang makan dan minuman, pedagang pakaian, pedagang rokok, pedagang kaca mata, dan pedagang gelang dan lain-lain sejumlah 103 pedagang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor - faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang informal. Untuk itu, penulis memilih judul **“Analisis Pendapatan Pekerja Sektor Informal di Kota Jambi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di sekitar Tugu Keris Siginjai)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik pedagang kaki lima di sekitar Tugu Keris Siginjai?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima sekitar Tugu Keris Siginjai?
3. Apakah ada perbedaan pendapatan pedagang kaki lima sekitar Tugu Keris Siginjai sebelum dan pada masa pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik pedagang kaki lima di sekitar Tugu Keris Siginjai.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang kaki lima di sekitar Tugu Keris Siginjai.
3. Untuk menganalisis perbedaan pendapatan pedagang kaki lima sebelum dan pada masa pandemi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan kemanfaatan akademis dari hasil penelitian ini dapat memberikan nilai tambah bagi penelitian ilmiah, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan komparatif bagi peneliti ilmiah yang mengkaji peran PKL dan dampaknya terhadap pendapatan pada pedagang kaki lima di sekitar Tugu Keris Siginjai.

2. Manfaat Praktisi

Harapannya hasil penelitian ini bisa sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan bagi pemerintahan dalam memberikan penyuluhan kepada pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatannya.